

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era perdagangan bebas telah dimulai. Berlakunya ACFTA (*Asean China Free Trade Area*) pada 1 Januari 2010 lalu dan berlaku sepenuhnya AFTA (*Asean Free Trade Area*) pada tahun 2015. Dengan berlakunya perdagangan bebas, persaingan yang terjadi tidak hanya pada antara perusahaan domestik, namun juga dengan perusahaan luar negeri. Bagi perusahaan yang telah memiliki bisnis yang kuat dan berpengalaman akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan bebas ini. Perusahaan yang masih berskala kecil atau berskala nasional pasti akan sulit untuk bersaing dengan perusahaan asing, sehingga resiko mengalami *financial distress* akan semakin besar.

Salah satu contoh yang dirasakan adalah pada tahun 2008, terjadinya *global financial crisis* yang menyebabkan penurunan aktivitas bisnis secara umum. Banyak perusahaan di Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan negara lainnya yang mengalami kebangkrutan. Di dalam negeri, dampak dari *global financial crisis* tersebut menyebabkan beberapa perusahaan mengalami *de-listing* dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal itu dikarenakan karena perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress*.

Perusahaan dikatakan mengalami kondisi *financial distress* yaitu pada saat perusahaan tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi jadwal pembayaran kembali hutangnya kepada kreditur pada saat jatuh tempo (Emery dan Finnerty, 2007) dalam Sastriana dan Fuad (2013). Karena adanya ketidak

mampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya secara terus menerus dapat membuat perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan.

Kebangkrutan dari suatu perusahaan dapat diukur dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Laporan keuangan perusahaan merupakan suatu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan serta bagaimana perubahan posisi keuangan perusahaan yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat. Menurut Plat dan Platt (2006) *financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Kondisi ini pada umumnya ditandai dengan keadaan keuangan perusahaan yang krisis, dimana dalam keadaan ini dikatakan bahwa perusahaan mengalami penurunan dana dalam menjalankan usahanya yang dapat disebabkan oleh adanya penurunan dalam pendapatan dari hasil penjualan atau hasil operasi perusahaan untuk mendapatkan laba, namun pendapatan atau hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan kewajiban atau hutang yang banyak dan telah jatuh tempo.

Fenomena yang terjadi pada PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi perseroan hingga kuartal III-2017, DAJK diketahui memiliki utang terhadap beberapa perbankan yang jumlahnya mencapai Rp 870,17 miliar. Utang perbankan tersebut masuk dalam liabilitas jangka panjang perseroan yang mencapai Rp 913,3 miliar. Rinciannya, utang pada Standard Chartered Bank sebesar Rp 262,4 miliar, PT Bank Mandiri Tbk sebesar Rp 414,26 miliar, Bank Commonwealth Rp 50,4 miliar, Citibank N.A Rp 26,6 miliar, Bank Danamon Rp 9,9 miliar. Selain itu ada pula pembiayaan murabahah

dari PT Bank BRI Syariah dengan sub jumlah sebesar Rp 106,4 miliar. DAJK juga memiliki kewajiban sewa pembiayaan Rp 28,14 miliar dan lembaga keuangan Rp 96 juta. Sementara jumlah aset perseroan hingga akhir September 2017 sebesar Rp 1,3 triliun. Angka itu sudah turun jika dibandingkan jumlah aset pada akhir Desember 2016 sebesar Rp 1,5 triliun. (Sugianto, 2018).

Perusahaan yang juga mengalami *financial distress* adalah PT Asia Paper Mills (APM) mengantongi total utang mencapai Rp588,36 miliar kepada seluruh krediturnya. Rinciannya yaitu 47 kreditur konkuren dengan tagihan Rp209 miliar dan satu kreditur separatis Rp370,61 miliar. Sementara itu, sisanya kepada kreditur preferen atau kreditur yang diutamakan pembayarannya seperti upah karyawan, kantor pajak dan tagihan listrik. PT Asia Paper Mills diputus dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada 15 Februari 2017 atas permohonan Bank Mandiri. Debitur terbukti memiliki utang kepada BMRI senilai Rp370,64 miliar. (Sari, 2017).

Perusahaan yang mengalami *financial distress* dapat dikarenakan faktor perusahaan yang disebut dengan *agency cost* yang merupakan suatu hubungan antara pihak *principal* (pemegang saham) dan pihak agen (manajemen). Untuk dapat mengurangi masalah ini maka diterapkanlah *good corporate governance*. Menurut Seog (2007) dalam Fidyaningrum dan Retnani (2017), *good corporate governance* saat ini diketahui sebagai sebuah sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan *value*-nya dan memperbaiki kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini *good corporate governance* yang

digunakan yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dan dewan komisaris independen.

Kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh institusi dari keseluruhan saham yang beredar. Menurut Bodroastuti (2009), kepemilikan institusional mempunyai arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusional maka *financial distress* tidak akan terjadi pada suatu perusahaan karena manajemen tidak akan dapat untuk bertindak merugikan perusahaan. Hasil penelitian Aritonang (2013), menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Sama halnya dengan Jumianti, dkk (2015), menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Hasil penelitian yang sama dengan Setiawan, dkk (2016), menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress*. Sama juga dengan Haq, dkk (2016), menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress*. Hasil yang berbeda dengan penelitian Widyasaputri (2012), menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Sama halnya dengan Fidyaningrum dan Retnani (2017), menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajer dari keseluruhan saham yang beredar. Kepemilikan manajerial diasumsikan mampu mengurangi masalah keagenan yang timbul pada suatu perusahaan dan apabila itu

terjadi terus menerus dapat menimbulkan *financial distress* pada perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham manajerial diharapkan manajer dapat menghasilkan kinerja yang baik sehingga perusahaan dapat terhindar dari *financial distress*. Hasil penelitian Fathonah (2016), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress*. Sama halnya dengan Setiawan, dkk (2016), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil yang sama dengan Hanafi dan Breliastiti (2016), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Hasil yang berbeda dengan Widyasaputri (2012), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Sama halnya dengan Fidyaningrum dan Retnani (2017), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Jumlah dewan direksi merupakan satu bagian yang sangat penting karena dengan adanya jumlah dewan direksi yang besar dapat membantu perusahaan dalam mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi perusahaan sehingga dapat menguntungkan perusahaan dan dapat menghindari terjadinya *financial distress* di dalam perusahaan. Jumlah dewan direksi yang terlalu banyak dapat menimbulkan kerugian berupa permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan kontrol sehingga dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan. Hasil penelitian Widyasaputri (2012), menyatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap *financial distress*. Sama halnya dengan Manuputty (2013), menyatakan bahwa jumlah dewan direksi

berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Hasil yang sama dengan Yustong (2018), menyatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Hasil yang berbeda dengan Fidyaningrum dan Retnani (2017), menyatakan bahwa jumlah dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Hasil yang sama dengan Ananto, dkk (2017), menyatakan bahwa jumlah dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Jumlah dewan komisaris independen berfungsi untuk mengawasi kinerja dewan direksi dalam hal mengontrol masalah keuangan agar tidak terjadi suatu tindakan yang dapat merugikan perusahaan dan dapat membuat komisaris independen berperan penting supaya perusahaan dapat terhindar dari *financial distress*. Hasil penelitian Hanafi dan Breliastiti (2016), menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*. Sama halnya dengan Handojo (2017), menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Hasil yang sama dengan Hartianah dan Sulasmiyati (2017), menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Hasil yang berbeda dengan Ananto, dkk (2017), menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil yang sama dengan Fidyaningrum dan Retnani (2017), menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Ukuran perusahaan juga dapat menggambarkan keadaan dari perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki, semakin besar ukuran perusahaan tersebut tentunya semakin besar jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang besar akan mudah melakukan diversifikasi dan cenderung lebih kecil mengalami kebangkrutan (Triwahyuningtyas, 2012). Hasil penelitian Ariawan (2017), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Sama halnya dengan Hartanti dan Hatane (2017), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Hasil yang sama dengan Putri dan Merkusiwati (2014), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil yang berbeda dengan Fidyningrum dan Retnani (2017), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Hasil yang sama dengan Wibowo dan Musdholifah (2017), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Penelitian ini menggunakan sektor manufaktur, karena perusahaan manufaktur menjual produknya yang dimulai dengan proses produksi dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi. Perusahaan manufaktur lebih membutuhkan sumber dana jangka panjang untuk membiayai operasi perusahaan mereka. Perusahaan manufaktur juga memiliki berbagai sub industri sehingga dapat mencerminkan reaksi pasar modal secara keseluruhan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fidyaningrum dan Retnani (2017). Terdapat beberapa perbedaan penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan data tahun 2013-2015, sedangkan penelitian ini akan menggunakan data dari tahun 2013 hingga tahun 2017.
2. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan variabel kontrol sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel kontrol.

Atas dasar hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti meneliti kembali “ **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *FIRM SIZE* TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2017** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress*?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress* ?
3. Apakah jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap *financial distress* ?
4. Apakah jumlah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *financial distress* ?
5. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap *financial distress* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris :

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *financial distress*.
2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *financial distress*.
3. Pengaruh jumlah dewan direksi terhadap *financial distress*.
4. Pengaruh jumlah dewan komisaris independen terhadap *financial distress*.
5. Pengaruh *firm size* terhadap *financial distress*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat positif bagi :

1. Bagi akademisi, diharapkan dapat memperkaya dan menambah pengetahuan tentang konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris independen dan *firm size* terhadap *financial distress*. Serta dapat digunakan sebagai acuan dan informasi dalam pengembangan penelitian yang lebih baik lagi dan bahan perbandingan bagi peneliti yang akan mengambil topik yang sama.
2. Bagi praktisi, pengembangan ilmu pengetahuan sebagai tambahan informasi mengenai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan direksi, jumlah komisaris independen dan *firm size* terhadap *financial distress*.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditentukan, sebagai acuan untuk melakukan pembahasan masalah secara runtut dan jelas, sehingga tulisan dapat lebih mudah dipahami. Adapun sistematika penulisannya yang disusun menjadi lima bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Merupakan bab yang menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis dari penelitian yang dilakukan, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, variabel-variabel penelitian lengkap dengan definisi operasionalnya, metode pengumpulan data, serta metode analisis dalam penelitian.

BAB IV HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan hasil perhitungan statistik serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.